



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 20 Februari 2017

Halaman: 1

Liputan Khusus

Aborsi Ilegal Berkedok Telat Datang Bulan

"TELAT" bulan? Hubungi nomor 081xxxxxxx. Hampir semua pembaca pasti pernah melihat iklan berupa tempelan kertas tersebut. Biasanya iklan ditempel di Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Namun, pernahkah menyadari bahwa iklan-iklan tersebut sejatinya ilegal. Ya, iklan tersebut ilegal karena ditempel di tempat yang bukan peruntukannya. Selain itu, iklan tersebut juga diduga merupakan praktik aborsi terselubung. Biasanya si penempel iklan tidak mengatakan jika obat tersebut aman tanpa efek samping, karena terbuat dari bahan herbal, bukan kimia. Tentu saja, itu hanya bualan belaka. Sebab, konsumen tidak pernah tahu apa isi dari obat tersebut. Bisa jadi isi obat merupakan bahan kimia berbahaya yang dapat mengancam jiwa peminumnya.

Peredaran obat terlarang semacam itu, sudah menjadi sorotan Polresta Yogyakarta. Sayangnya, belum satu kasus pun berhasil diungkap. Polresta Yogyakarta juga belum pernah mendapat laporan terkait penjualan obat telat bulan.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Akbar Bantilan mengungkapkan, pihaknya belum pernah menangani laporan soal obat telat bulan maupun praktik aborsi terselubung iklan tersebut. Kendati demikian, pihaknya pernah mencoba mengukir iklan telat bulan tersebut, namun belum membuahkan hasil.

"Kami juga kerja sama dengan instansi terkait untuk mengungkap apa dan siapa dibalik iklan semacam itu. Tapi tidak mudah," kata Kompol Akbar Bantilan ketika ditemui Merapi di Kantor Polresta Yogyakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, untuk mengungkap kasus obat terlambat bulan, tidak harus melulu ada laporan dari korban. Bisa juga berawal dari temuan masyarakat. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, polisi akan melakukan penyelidikan.

Jika pelakunya jelas, maka polisi akan melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan. Polisi juga bisa melakukan tangkap tangan terhadap pelaku. Baik dari hasil penyelidikan atau pancingan dari korban.

OTT Tidak Mudah

Upaya tangkap tangan juga pernah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta. Namun, diakui hal tersebut tidak mudah. Kepala Satpol PP Yogyakarta, Nurwidi Hartana mengatakan, dibutuhkan kejelian dalam mengintai sasaran pemasangan. Apalagi pemasangan kertas itu juga acak dan dimungkinkan dilakukan saat dini hari. Penertiban sampah visual dan OTT pemasangan iklan itu tetap diupayakan. Tapi tidak dilakukan dalam waktu

Aborsi Merapi mencoba menelusuri lebih jauh iklan telat datang bulan ke nomor-nomor tersebut. Di salah satu simpang empat kawasan Sleman, didapatkan beberapa nomor berbeda. Tidak diketahui jelas, si pengiklan adalah orang yang sama atau bukan. Dua nomor yang ditelepon, tidak bersedia mengangkat telepon. Namun, satu diantaranya langsung mengirimkan pesan singkat (SMS) setelah telepon ditutup.

Nomor tersebut meminta agar mengirim SMS untuk mengutarakan kepentingannya. Benar saja, SMS yang dilayangkan oleh Merapi, dibalas 3 kali oleh si pengiklan. Sayang, SMS keempat dan kelima yang menanyakan cara dan lokasi transaksi tidak direspons.

Pada jawaban SMS pertama, si pengiklan menginfokan harga obat pelancar menstruasi atau terlambat bulan. Obat tersebut dibanderol Rp 550.000. Pada jawaban kedua, dijelaskan bahwa obat diminum satu kali. Reaksi obat, akan terasa setelah 2 jam diminum. Sedangkan pada SMS ketiga, pengiklan obat terlambat bulan mengatakan jika obat tersebut aman tanpa efek samping, karena terbuat dari bahan herbal, bukan kimia.

Tentu saja, itu hanya bualan belaka. Sebab, konsumen tidak pernah tahu apa isi dari obat tersebut. Bisa jadi isi obat merupakan bahan kimia berbahaya yang dapat mengancam jiwa peminumnya.

Peredaran obat terlarang semacam itu, sudah menjadi sorotan Polresta Yogyakarta. Sayangnya, belum satu kasus pun berhasil diungkap. Polresta Yogyakarta juga belum pernah mendapat laporan terkait penjualan obat telat bulan.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Akbar Bantilan mengungkapkan, pihaknya belum pernah menangani laporan soal obat telat bulan maupun praktik aborsi terselubung iklan tersebut. Kendati demikian, pihaknya pernah mencoba mengukir iklan telat bulan tersebut, namun belum membuahkan hasil.

"Kami juga kerja sama dengan instansi terkait untuk mengungkap apa dan siapa dibalik iklan semacam itu. Tapi tidak mudah," kata Kompol Akbar Bantilan ketika ditemui Merapi di

Sambungan halaman 1 dekat karena masih fokus pengamanan tahapan Pilkada Yogyakarta. "Kami akan upayakan itu. Saat ini kami masih fokus membantu kepolisian melaksanakan pengamanan Pilkada. Kami menugus semuanya konduktif dulu," kata Nurwidi.

Upaya OTT pemasangan iklan telat bulan itu dipilih karena penertiban dengan membersihkan tempelan kertas itu tidak membuat penempelan berhenti. Setelah sampah visual itu dibersihkan, muncul tempelan baru. Upaya menghubungi nomor telepon yang tertera di tempelan telat bulan juga dilakukan untuk mencari pemasang guna diperingatkan.

"Kami juga coba menghubungi nomor telepon yang tertera, tapi sulit dihubungi," ujarnya.

Pemasangan tempelan telat bulan itu melanggar Perda Nomor 18 tahun 2002 tentang pengelolaan kebersihan karena dipasang tidak pada tempatnya yakni di APILL. Jika pemasang berhasil ditertibkan, terancam kurungan 3 bulan dan atau denda Rp 20 juta sesuai amanat perda kebersihan tersebut. (Riz/Tri/Oin)-e

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi
☒ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Plt. Kepala
Sekretaris
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005